

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan oleh suatu negara maupun wilayah agar keadaan atau kondisi negara menunjukkan hal yang mengarah kepada kondisi yang lebih baik dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berada di seluruh belahan negara ataupun daerah. Pembangunan harus direncanakan sebaik mungkin agar tahap-tahap perencanaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pembangunan dilakukan terintegasi dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan daerah dengan target yang telah direncanakan melalui proses pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga kualitas pada pembangunan ini dapat diwujudkan sesuai dengan struktur dan rencana yang telah ditetapkan pada suatu negara maupun penduduknya (Sanggelorang *et al.*, 2015).

Berbagai aspek dalam pembangunan suatu negara meliputi ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Posisi manusia pada aspek pembangunan menjadi inti pokok pada tercapainya suatu pembangunan. Bagian terpenting untuk menaksir kesejahteraan masyarakat dan parameter majunya suatu negara dapat ditentukan dari pembangunan manusia yang terjadi di negara itu sendiri. Negara dapat dianggap maju bukan sekedar berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) saja, tetapi juga meliputi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta aspek harapan hidup masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan yang melihat pertumbuhan ekonomi dari

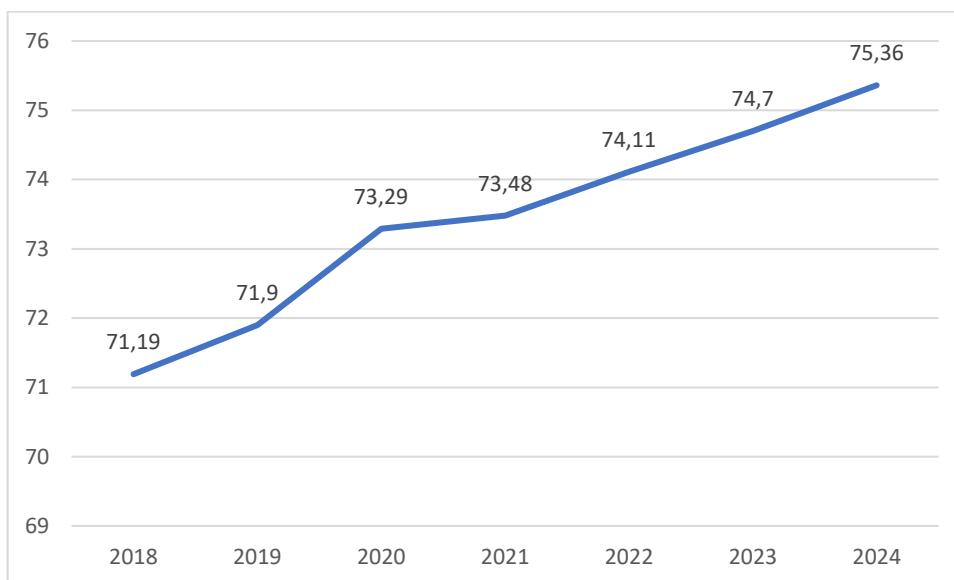
beberapa faktor seperti tingkat kualitas hidup penduduk setiap negara yang dapat diukur dari kemampuan, kreatifitas, dan produktifitas pada setiap manusia yang mengalami peningkatan maka mereka akan menjadi sebuah bagian dari kemajuan efektif. Upaya keberhasilan pembangunan manusia yang telah direalisasikan memberikan perspektif mengenai akibat pembangunan manusia terhadap penduduk serta perspektif mengenai presentase pencapaian ideal (Eka *et al.*, 2022).

Konsep penghitungan pembangunan manusia pertama kali ini diimplementasikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih umum dengan sebutan *United Nation Development Program* (UNDP) dalam bentuk *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. Laporan Pembangunan Manusia Tahunan (HDR) mempublikasikan kedua indeks ini secara berkala. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran pembangunan manusia yang menggabungkan tiga dimensi termasuk pendidikan (ditaksir dari rata-rata tahun sekolah per kapita/estimasi tahun sekolah), kesehatan (ditaksir dari usia harapan hidup sedari waktu lahir/ harapan hidup saat kelahiran) dan standar hidup yang layak (ditaksir dari kemampuan daya beli/keseimbangan daya beli). Bagian pertama Laporan Pembangunan Manusia (HDR) dari tahun 1990 menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan usaha untuk meningkatkan preferensi yang dapat diakses manusia. Dari masing-masing pilihan yang tersedia, yang paling penting adalah untuk tetap sehat dan panjang umur untuk belajar, dan memiliki kemampuan

untuk mendapatkan apa yang diperlukan demi mewujudkan hidup dengan baik (Mongan, 2019).

Pemerintah Indonesia sudah mengakui bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting. Tujuan negara seperti yang tercantum pada UUD 1945 pada alinea keempat yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan untuk mendukung ketertiban dunia.

Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pembangunan manusia di Aceh terus meningkat dan membaik tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan data Indeks Pembangunan Manusia dan komponen lain yang kian bertambah pada tahun 2018-2024. Data Indeks Pembangunan Manusia Aceh terperinci dapat dilihat pada grafik Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Data BPS (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2024 secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia provinsi Aceh merasakan pergeseran yang positif sehingga menghadapi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Semenjak tahun 2016, Aceh telah menempatkan diri sebagai wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia khususnya di Provinsi Aceh.

Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh pada tahun 2018 telah mencapai 71,19 poin yang meningkat sebesar 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 71,90 poin yang bertambah sebesar 0,71 poin dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 telah mencapai 71,99 poin yang menunjukkan keadaan stagnan dengan kenaikan hanya sedikit yaitu meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID 19 yang kemungkinan besar menjadi penyebab perlambatan. Selanjutnya pada tahun 2021 mencapai 72,18 poin yang meningkat sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya dengan kenaikan hanya sedikit yang disebabkan masih adanya pandemi COVID 19 yang kemungkinan besar menjadi penyebab perlambatan. Lalu mengalami Peningkatan pada tahun 2022 mencapai 72,80 poin yang meningkat sebesar 0,62 poin dari tahun sebelumnya. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Aceh tahun 2022 disebabkan sudah meredanya pandemi COVID 19 dan juga didukung oleh semua dimensi indeks pembangunan manusia mulai pulih. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 mencapai 74,70 poin

yang meningkat sebesar 1,9 poin yang sangat tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh mencapai 75,36 poin yang menempati Posisi tertinggi kelima se-Sumatera dan ke-11 secara nasional.

Berdasarkan data dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia dari mengalami kenaikan yang merupakan hal baik untuk provinsi Aceh dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan fokus tujuan nasional. Peningkatan yang terjadi di provinsi Aceh setiap tahunnya terjadi karena kenaikan masing masing komponen pembentuknya antara lain kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat yang meningkat. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu daerah. Pertumbuhan inovasi dan keterampilan dipengaruhi oleh semakin baiknya pendidikan yang didapatkan masyarakat. Sementara itu, kesehatan yang berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini berkontribusi pada perekonomian yang ada di daerah tersebut akan mengalami peningkatan yang lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan tindakan yang terarah dan juga perlunya kontribusi seluruh warga untuk memaksimalkan kualitas setiap daerahnya.

Secara keseluruhan, penjelasan di atas mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus menunjukkan peningkatan, namun perlu diperhatikan dan diidentifikasi masih adanya tantangan besar yang dihadapi oleh Provinsi Aceh dalam menjaga konsistensi pembangunan manusia untuk

mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

Menurut Mangkoesoebroto (dalam Primananda *et al.*, 2023), biaya yang dikeluarkan pemerintah merefleksikan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi biaya yang harus disiapkan. Biaya tersebut mendapat pendanaan melalui anggaran pemerintah yang nantinya menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Anggaran atau rencana keuangan yang diberikan pada suatu bidang memperlihatkan keseriusan pemerintah terhadap persoalan yang timbul pada bidang tersebut.

Biaya yang dibayarkan pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur pada hakikatnya merupakan prioritas utama pada pembangunan nasional. Namun dampak yang dirasakan pun tidak langsung dirasakan melainkan membutuhkan waktu. Sehingga pembangunan pasti tidak lepas atas peran pemerintah dalam menjaga dan mengatur perekonomian. Oleh karena itu intervensi pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal penyediaan barang publik dan menjadi penyeimbang untuk pemerataan perekonomian. Kontroversi utama adalah apakah pengeluaran sektor publik (kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur) akan membangun kualitas dan menaikkan tingkat kesejahteraan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tercermin dalam anggaran biaya yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya yang diberikan kepada suatu aspek memperlihatkan kesungguhan pemerintah terhadap persoalan yang timbul pada bidang tersebut. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(UU-APBN) dibuat untuk memperjelas hak dan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal terkait pembangunan. Namun, sejalan dengan prosedur pembangunan daerah, pemerintah daerah berhak untuk membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Ini mengikuti prinsip otonomi daerah yang ditunjuk melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan APBN dan APBD (Mongan, 2019).

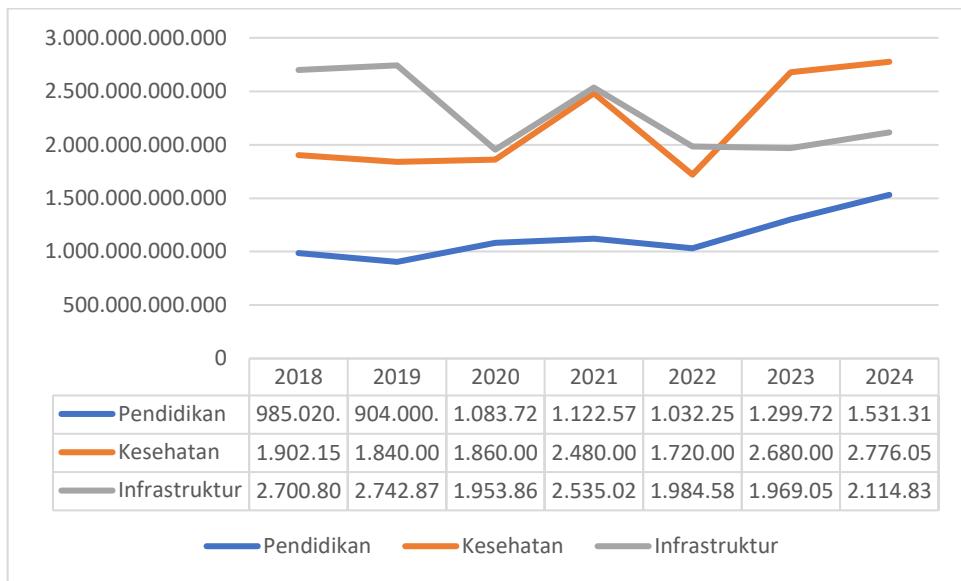
Pemerintah bersungguh-sungguh demi terciptanya pembangunan manusia yang ideal terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 4. Pasal ini menyajikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan nasional, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Pada sektor infrastruktur yang tertuang dalam UU NO. 75 Tahun 2014 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti jalan tol Trans Sumatera, serta beberapa proyek pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, jalan, dan perkeretaapian di beberapa wilayah Indonesia (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022).

Menurut Todaro, modal manusia (*Human Capital*) harus mempunyai parameter pendidikan dan kesehatan menunjukkan keberhasilan pembangunan yang fundamental (mendasar). Hubungan kesehatan dan pendidikan terdiri dari tindakan analitis yang sama. Keduanya terbentuk dari modal manusia efek ganda

dari biaya yang dikeluarkan pada sektor pendidikan terhadap keberhasilan dalam sistem pendidikan. Jika modal manusia berkembang maka biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan dan pendidikan akan semakin tinggi pula (Ezkirianto & Alexandi, 2018).

Biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk pembelian berdasarkan fungsi dan kegunaannya, fungsi tersebut terbagi dalam sembilan fungsi pokok, yaitu: hukum dan ketertiban, pelayanan umum, perekonomian, lingkungan hidup, tempat umum, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, dan jaminan sosial, sesuai dengan aturan Nomor 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selaras dengan Pasal 33. Terdapat tiga fungsi utama yang harus diuji karena memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian. Fungsi-fungsi ini diantaranya ialah fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Fokus pengembangan suatu daerah adalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk membantu terealisasikannya konsep tersebut perlu dilakukan alokasi anggaran yang sesuai dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Arfiyansyah, 2018).

Biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024)

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir 2018 hingga 2024 secara umum perkembangan tingkat dana yang dikeluarkan pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Provinsi Aceh mengalami tren fluktuasi setiap tahunnya, hal ini tentu menjadi isu menarik dalam penelitian ini. Kondisi pada tahun 2018 menuju tahun 2019 menunjukkan adanya terjadi penurunan di beberapa sektor dan pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan adanya terjadi kenaikan dibeberapa sektor namun pada tahun 2022 menunjukkan adanya terjadi penurunan di semua sektor hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 menunjukkan adanya terjadi peningkatan di semua sektor.

Fenomena menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada ketiga sektor tersebut tidak berjalan secara konsisten, baik dalam peningkatan maupun penurunannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terlihat

adanya penurunan signifikan pada pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan, sementara sektor infrastruktur mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas anggaran oleh pemerintah daerah, yang belum tentu selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021, meskipun masih berada dalam masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan kembali pada anggaran pendidikan dan kesehatan, yang mencerminkan adanya upaya pemulihan sektor vital tersebut. Namun demikian, pada tahun 2022 ketiga sektor justru mengalami penurunan anggaran secara serentak, setelah itu akhirnya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ketiga sektor justru mengalami peningkatan.

Fluktuasi anggaran yang tidak seragam ini memunculkan pertanyaan penting terkait efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah daerah. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh menunjukkan tren meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakstabilitan dalam alokasi belanja publik dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan manusia jangka panjang. Khususnya, ketika sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak mendapatkan dukungan anggaran yang konsisten.

Dengan demikian, fenomena ini menjadi landasan penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur benar-benar berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai

efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata.

Hasil *Research Gap* dari penelitian terdahulu banyak yang mengkaji di antaranya penelitian Pake *et.al.*, (2018) mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh positif yang besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian Akbar (2016) hasil penelitian mengindikasikan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan memiliki dampak positif dan relevan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan dana yang dikeluarkan pemerintah di bidang kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tidak berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga adanya penelitian menjadi menarik untuk di teliti dan di analisa terkait indeks pembangunan manusia dan yang mempengaruhinya, dari segi biaya yang dikeluarkan pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2017-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang akan di bahas penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, sektor Kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, sektor Kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khazanah pengetahuan di bidang ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan dana yang dikeluarkan pemerintah dan indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dalam mengatasi masalah indeks pembangunan manusia dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi para peneliti dan pihak lainnya yang membutuhkan.